SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan kearsipan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;
b. bahwa salah satu komponen dari empat pilar dalam penyelenggaraan kearsipan adalah kode klasifikasi arsip;
c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenanganya.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
6. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
8. Arsip Dinamis adalah adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan.

10. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis;
b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. mewujudkan tertib Arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan di Pemerintah Daerah; dan
d. menunjang kelancaran proses pemberkasan naskah dinas dan pembuatan daftar Arsip Dinamis dalam penemuan kembali Arsip.

BAB III
KODE KLASIFIKASI ARSIP
Pasal 3

1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
   a. fungsi fasilitatif; dan
   b. fungsi substantif.
3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di Perangkat Daerah/Pencipta Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 April 2023
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

000 UMUM

000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

000.1.1 Telekomunikasi

000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah

000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD

000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai

000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri

000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah

000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD

000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai

000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)

000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat

000.1.6 Penyediaan Konsumsi

000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas

000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas

000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan

000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan

000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor

000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape

000.1.8.2 Penghijauan

000.1.8.3 Perbaikan Gedung

000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor

000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma

000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman

000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer

000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan

000.1.9.2 Pemasangan

000.1.10 Ketertiban dan Keamanan

000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas

000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan

000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir

000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2 PERLENGKAPAN

000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan

000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan

000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor

000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor

000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

000.2.3 Distribusi

000.2.3.1 Barang habis pakai

000.2.3.2 Barang milik daerah

000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan

000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN

000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.4.2 Deposit Bahan Pustaka

000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman

000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional

000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog

000.4.3 Koleksi Pustaka

000.4.3.1 Pembelian

000.4.3.2 Hibah

000.4.3.3 Hadiah

000.4.3.4 Tukar Menukar

000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR

000.4.3.6 Terbitan Internal

000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus

000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)

000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka

000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi

000.4.6 Layanan Perpustakaan

000.4.6.1 Keanggotaan

000.4.6.2 Peminjaman

000.4.6.3 Pengembangan gemar baca

000.4.7 Kerjasama Perpustakaan

000.4.7.1 MoU

000.4.7.2 Perjanjian kerjasama

000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional

000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan

000.4.8.1 Pengembangan situs web

000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia

000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan

000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital

000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

000.4.10 Konservasi

000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan

000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan

000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan

000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)

000.4.12 Transformasi Digital

000.4.13 Kurasi Digital

000.4.14 Pengembangan Perpustakaan

000.4.14.1 Perpustakaan Umum

000.4.14.2 Perpustakaan Khusus

000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah

000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.5 KEARSIPAN

000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.5.2 Pembinaan Kearsipan

000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis

000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis

000.5.2.3 Penilaian Arsiparis

	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain : Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain : Fasilitasi SDM Kearsipan,Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain : Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain : Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)

000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)

000.5.4 Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)

000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

000.5.6 Penyusutan Arsip

000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)

000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

- 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
- 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

- 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain : Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan
- 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
- 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip)
- 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
- 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
- 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
- 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
- 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
- 000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)

000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)

000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN

000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana

000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan

000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

000.5.15 Pengawasan Kearsipan

000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal

000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal

000.5.15.3 Sanksi

000.6 PERSANDIAN

000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.6.2 Pengamanan persandian

000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto

000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto

000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan

000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi

000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian

000.6.3.2 Administrasi Pengkajian

000.6.3.3 Pelaksanaan

000.6.3.4 Pelaporan

000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian

000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

000.6.4.2 Jaring Komunikasi

000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik

000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi

000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi

000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing

000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna

000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik

000.6.5.7 Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
  - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
  - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
  - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota
  - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
  - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
  - 000.7.1.6 Musrenbang Desa
- 000.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah
  - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
  - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
  - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
  - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 000.7.2.6 Program kerja tahunan
  - 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja
  - 000.7.2.8 Laporan Berkala
  - 000.7.2.9 Laporan Insidential
  - 000.7.2.10 Evaluasi Program
- 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
  - 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
  - 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
  - 000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
  - 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
  - 000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah
- 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
  - 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
  - 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
  - 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional

000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara

000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

000.8.1.1 Pembentukan

000.8.1.2 Pengubahan

000.8.1.3 Pembubaran

000.8.2 Uraian Jabatan

000.8.2.1 Analisa Jabatan

000.8.2.2 Analisa Beban Kerja

000.8.3 Ketatalaksanaan

000.8.3.1 Proses Bisnis

000.8.3.2 Standar Pelayanan

000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur

000.8.3.4 Pelayanan Publik

000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional

000.8.5 Evaluasi Kelembagaan

000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

000.8.6.1 Budaya Kerja

000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi

000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan

000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan

000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

000.9.6.1 Data

000.9.6.2 Statistik

000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian

000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)

000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan

100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)

100.1.4.5 Assosiasi Daerah

100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa

100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama

100.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

100.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

100.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah

100.2.4 Fasilitasi Kecamatan

100.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan

100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah

100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara

100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah

100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan

100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah

100.3 HUKUM

100.3.1 Program Legislasi

100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah

100.3.1.2 Program Legislasi

100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah

100.3.3.1 Keputusan / Ketetapan Gubernur

100.3.3.2 Keputusan / Ketetapan Bupati

100.3.3.3 Keputusan / Ketetapan Walikota

100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi

100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4 Instruksi / Surat Edaran
100.3.4.1 Instruksi / Surat Edaran Provinsi
100.3.4.2 Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
100.3.4.3 Instruksi / Surat Edaran Kota
100.3.4.4 Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5 Surat Perintah
100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU)/ Kontrak/ Perjanjian kerja sama
100.3.7.1 Dalam Negeri
100.3.7.2 Luar Negeri
100.3.8 Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
100.3.9 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum
100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
100.3.11.3 Tata Usaha Negara
100.3.11.4 Perburuhan
100.3.11.5 Arbitrase
100.3.11.6 Sengketa Adat
100.3.12 Perijinan
100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
100.3.13.1 Hak Cipta

100.3.13.2 Hak Paten
100.3.13.3 Hak Desain Industri
100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
100.3.13.5 Hak Merk
100.3.14 Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
200.1.2.3 Bela Negara
200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan

200.1.3 Kewaspadaan Nasional
200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
200.1.4.1 Ketahanan Seni
200.1.4.2 Ketahanan Budaya
200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
200.1.4.6 Fasilitasi
200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat

200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
200.1.4.11 Fasilitasi Ormas

200.1.5 Politik Dalam Negeri
200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
200.1.5.6 Pemerintah Daerah
200.1.5.7 Database Parpol
200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
200.1.5.9 Pemilihan Umum

200.1.6 Ketahanan Ekonomi
200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2 PEMILU
200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik

200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik

200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan

200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual

200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu

200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota

200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR

200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR

200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

270.04.05 Peta Daerah Pemilihan

200.2.5 Pencalonan Pemilu

200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan

200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran

200.2.5.3 Daftar bakal calon

200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon

200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi

200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap

200.2.6 Kampanye Pemilu

200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye

200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye

200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye

200.2.7 Dana Kampanye

200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye

200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu

200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye

200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara

200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara

200.2.8.2 Master surat suara

200.2.8.3 Surat suara yang terpakai

200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)

200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah

200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu

200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu

200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu

200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon

200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan

200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah

300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja

300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja

300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

300.1.4 Perlindungan Masyarakat

300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan

300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan

300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring

300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan

300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan

300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan

300.2.2.6 Registrasi BEACON

300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan

300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan

300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan

300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)

300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi

300.2.8 Operasi Komunikasi

300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)

300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)

300.2.8.3 Registrasi BEACON

300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan

300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi

300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi

300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi

300.2.12.1 Laporan Harian

300.2.12.2 Laporan Bulanan

300.2.12.3 Laporoan Tahunan

300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.1.2 Pembangunan Sumber Daya

400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.3 Peningkatan Infrastruktur

400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha

400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal

400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
400.1.5.5 Ketenagakerjaan
400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
400.2.2.1 Data gender
400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)

400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

400.2.3.2 Data perlindungan perempuan

400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan

400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender

400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender

400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu

400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)

400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

400.2.4.2 Data perlindungan anak

400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi

400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak

400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak

400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak

400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak

400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi

400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)

400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak

400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
- 400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
- 400.3.2.2 Pelatihan Sosial
- 400.3.2.3 Peringatan Hari anak
- 400.3.2.4 Block Grant

400.3.3 Pendidikan Masyarakat
- 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
- 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
- 400.3.3.3 Pembinaan Program
- 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
- 400.3.3.5 Pameran
- 400.3.3.6 Rakor
- 400.3.3.7 Sosialisasi
- 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi

400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik

400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
- 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
- 400.3.5.2 Block Grant
- 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
- 400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan
- 400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)
- 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin

400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
- 400.3.6.1 Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
- 400.3.6.2 Block Grant
- 400.3.6.3 Lomba, festival
- 400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek
- 400.3.6.5 Pendataan
- 400.3.6.6 Kelembagaan

400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
- 400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan
- 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
- 400.3.7.3 Sertifikasi Guru
- 400.3.7.4 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
- 400.3.7.5 Peningkatan kesejahteraan guru

	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Setifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.7	Block grant
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan	
	400.3.11	Penilaian Akademik
	400.3.12	Penilaian Non Akademik
	400.3.13	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian

400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan

400.3.12.1 Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan

400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran

400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan

400.3.13.1 Prasarana Pendidikan

400.3.13.2 Sarana Pendidikan

400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan

400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah

400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi

400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi

400.4.3.1 Olahraga Massal

400.4.3.2 Olahraga Tradisional

400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata

400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga

400.4.4.1 Olahraga Pendidikan

400.4.4.2 Olahraga Rekreasi

400.4.4.3 Olahraga Prestasi

400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga

400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

400.4.5.1 Olahraga Tradisional

400.4.5.2 Layanan Khusus

400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan

400.4.6.2 Penghargaan Olahraga

400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga

400.4.7.1 Pembibitan Olahraga

400.4.7.2 Kompetisi

400.4.7.3 IPTEK Olahraga

400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan

400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan

400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga

400.4.9.1 Industri Olahraga

400.4.9.2 Promosi Olahraga

400.4.10 Olahraga Prestasi

400.4.10.1 Daerah

400.4.10.2 Nasional

400.4.10.3 Internasional

400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan

400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan

400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)

400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)

400.5.2.3 Pengembangan

400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda

400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan

400.5.3.2 Wawasan Lingkungan

400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum

400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda

400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa

400.5.4.2 Kapasitas IPTEK

400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK

400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)

400.5.5.1 Pengkajian

400.5.5.2 Pengembangan

400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)

400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan

400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan

400.5.7 Kewirausahaan

400.5.7.1 Kelembagaan

400.5.7.2 Pengaderan

400.5.7.3 Perintisan

400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan

400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya

400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya

400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya

400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya

400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda

400.5.9.1 Standardisasi

400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda

400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda

400.5.10.1 Kemitraan

400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN

400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

400.6.2.1 Registrasi Nasional

400.6.2.2 Pelindungan

400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan

400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi

400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman

400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan

400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa

400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film

400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi

400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya

400.6.4.1 Sejarah

400.6.4.2 Pemetaan nilai

400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai

400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi

400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah

400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah

400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya

400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya

400.6.5.2 Kekayaan budaya

400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia

400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN

400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar

400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga

400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer

400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer

400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas

400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit

400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology

400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah

400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer

400.7.2.9 Pembiayaan darah

400.7.2.10 Penggunaan darah rasional

400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah

400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan

400.7.2.13 Akreditasi puskesmas

400.7.2.14 Puskesmas berprestasi

400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan

400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan

400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)

	400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
	400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko

400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa

400.7.7.2 Imunisasi

400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan

400.7.7.4 Kesehatan matra

400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung

400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis

400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual

400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut

400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan

400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia

400.7.9 Pengendalian penyakit bersumber binatang

400.7.9.1 Pengendalian malaria

400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis

400.7.9.3 Pengendalian zoonosis

400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan

400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular

400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah

400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik

400.7.10.3 Penyakit kanker

400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif

400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan

400.7.11 Penyehatan lingkungan

400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar

400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum

400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat

400.7.11.4 Higien sanitasi pangan

400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi

400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan

400.7.13 Gizi

400.7.13.1 Gizi makro

400.7.13.2 Gizi mikro

400.7.13.3 Gizi klinik dan diatetik

400.7.13.4 Konsumsi makanan dan jasa makanan

400.7.13.5 Kewaspadaan gizi

400.7.14 Kesehatan ibu

400.7.14.1 Kesehatan ibu hamil

400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas

400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi

400.7.14.4 Keluarga berencana

400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi

400.7.15 Kesehatan anak

400.7.15.1 Kelangsungan hidup bayi

400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah

400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko

400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja

400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak

400.7.16 Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer

400.7.16.1 Kesehatan tradisional keterampilan

400.7.16.2 Kesehatan tradisional ramuan

400.7.16.3 Kesehatan alternatif dan komplementer

400.7.16.4 Penapisan dan kemitraan

400.7.17 Kesehatan kerja dan Olah raga

400.7.17.1 Pelayanan kesehatan kerja

400.7.17.2 Kapasitas kerja

400.7.17.3 Lingkungan kerja

400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja

400.7.17.5 Kesehatan perkotaan

400.7.17.6 Kesehatan olahraga

400.7.18 Obat Publk dan perbekalan kesehatan

400.7.18.1 Harga obat publik

400.7.18.2 Pengadaan obat

400.7.18.3 Perbekalan kesehatan

400.7.19 Produksi dan distribusi alat kesehatan

	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia Kesehatan

400.7.26 Kesehatan Haji

400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji

400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji

400.7.27 Promosi Kesehatan

400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan

400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran

400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan

400.7.27.4 Hari kesehatan

400.7.28 Data dan Informasi

400.7.28.1 Statistik kesehatan

400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi

400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan

400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik

400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen

400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen

400.7.29.4 Obat Asli Indonesia

400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan

400.7.30.2 Standardisasi produk pangan

400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan

400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan

400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya

400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.8.2 Fasilitasi

400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan
400.8.2.4 Kasus Keagamaan
400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan

400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan
400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.9 SOSIAL

400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita
400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus

400.9.3 Rehabilitasi Sosial
400.9.3.1 Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi social
400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
400.9.4.2 Tuna susila dan korban traffking perempuan

400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi

400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas

400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

400.9.6 Pelayanan sosial lanjut usia

400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar panti

400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga

400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan

400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial

400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya

400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial

400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial

400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah

400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan mitigasi

400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial

400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial

400.9.10.4 Kerjasama

400.9.11 Jaminan Sosial

400.9.11.1 Seleksi dan vrifikasi

400.9.11.2 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi

400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran

400.9.11.4 Kerjasama

400.9.12 Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial

400.9.12.1 Ketahanan keluarga

400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan

400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial

400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha

400.9.12.5 Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas

400.9.13 Pemberdayaan komunitas adat terpencil

400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan

400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia

400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi

400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil

400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan

400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

400.9.14.1 Identifikasi dan analisis

400.9.14.2 Pengembangan kapasitas

400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh

400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas

400.9.14.5 Bantuan Langsung

400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan

400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan

400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial

400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan

400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa

400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat

400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
400.10.4.1 Budaya Nusantara
400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan

400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan

400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.11.2 Pertamanan

400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan

400.11.2.2 Taman Kota

400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

400.11.3 Pemakaman

400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman

400.11.3.2 Pemakaman

400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman

400.11.4 Jalur Hijau

400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau

400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan

400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air

400.11.5 Peran Serta Masyarakat

400.11.6 Pengawasan dan Penindakan

400.11.7 Pengelolaan Data

400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

400.12.2 Pendaftaran Penduduk

400.12.2.1 Identitas Penduduk

400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI

400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara

400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan

400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.3 Pencatatan Sipil

400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian

400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian

400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan

400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan

400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan

400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan

400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan

400.12.5.1 Kuantitas Penduduk

400.12.5.2 Kualitas Penduduk

400.12.5.3 Mobilitas Penduduk

400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk

400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi

400.12.6 Penyerasian Kependudukan

400.12.6.1 Indikator Kependudukan

400.12.6.2 Proyeksi Penduduk

400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan

400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah

400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk

400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk

400.13.3.1 Penyiapan fasilitas

400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk

400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk

400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk

400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk

400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter

400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter

400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk

400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi

400.13.6.2 Pemanfaatan parameter

400.13.7 Pengembangan Sistem

400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal

400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.8 Pengembangan Materi

400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal

400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.9 Monitoring dan Evaluasi

400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal

400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.10 Analisis Sosial

400.13.11 Analisis Ekonomi

400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan

400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah

400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana

400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta

400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta

400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan

400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria

400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria

400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria

400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak

400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas

400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak

400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak

400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
- 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
- 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
- 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
- 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
- 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga

400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga

400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
- 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga

400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

- 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

- 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

- 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
- 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.41 Advokasi dan pencitraan

400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi

- 400.13.42.1 Promosi
- 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
- 400.13.42.3 Produk media komunikasi

400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi

400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

- 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah

- 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.46 Tenaga Lini Lapangan

- 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan

400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan

400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan

400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan

400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan

400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.51 Analisis dan evaluasi

400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk

400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data

400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi

400.13.52.2 Pengelolaan bank data

400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi

400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi

400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi

400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan

400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1 Keprotokolan

400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara,pelantikan,peresmian,dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)

400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan

400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah

400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri

400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat

400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas,foto/ video/ rekaman suara/ multi media

400.14.4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan

400.14.4.1 Kliping koran

400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat

400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan

400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah

400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah

400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM

400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan

400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)

400.14.5.5 Forum Kehumasan

400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa

400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD

400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten

400.14.8 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal

400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik

400.14.10 Pameran /sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan

400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan

400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

500.1.2.1 Ketersediaan Pangan

500.1.2.2 Akses Pangan

500.1.2.3 Kerawanan Pangan

500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan

500.1.3.1 Distribusi Pangan

500.1.3.2 Harga Pangan

500.1.3.3 Cadangan Pangan

500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan

500.1.4.1 Konsumsi Pangan

500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan

500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar

500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan

500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan

500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)

500.1.7 Bimbingan Teknis

500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri

500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha

500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan

500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan

500.2.2.4 Informasi Perusahaan

500.2.2.5 Pelaku Pasar

500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah

500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah

500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal

500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri

500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi

500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi

500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik

500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik

500.2.2.14 Informasi Pasar

500.2.2.15 Informasi Hasil Industri

500.2.2.16 Barang Strategis

500.2.2.17 Bahan Pokok Agro

500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar

500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi

500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar

500.2.3.4 Tata usaha

500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi

500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen

500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha

500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan

500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri

500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan

500.2.3.11 Jasa

500.2.3.12 Kerjasama

500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama

500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian

500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran

500.2.3.16 Pengawasan

500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP

500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi

500.2.4.1 Pengkajian pasar

500.2.4.2 Pengawasan Transaksi

500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit

500.2.4.4 Pengkajian pasar

500.2.4.5 Pengembangan Pasar

500.2.4.6 Sistem informasi

500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang

500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang

500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang

500.2.5 Bimbingan Teknis

500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM

500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM

500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi

500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas

500.3.3 Produksi

500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan

500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan

500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan

500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

500.3.4 Pembiayaan

500.3.4.1 Program Pendanaan

500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam

500.3.4.3 Urusan Permodalan

500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan

500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit

500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)

500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha

500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri

500.3.5.2 Ekspor dan Impor

500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran

500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha

500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis

500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia

500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan

500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM

500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat

500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500.3.6.5 Advokasi

500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis

500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1 Penelitian Koperasi
500.3.8.2 Penelitian UKM
500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga

500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
500.3.10.2 Sarana dan Prasarana

500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

500.4 KEHUTANAN

500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.4.2 Penyuluhan
500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
500.4.2.2 Materi Penyuluhan
500.4.2.3 Program Penyuluhan
500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
500.4.2.8 Deseminasi
500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan

500.4.3 Planologi Kehutanan
500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan

	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)

500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi non kayu
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21	Industri Non Kayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan

	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam

500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
500.4.6.13 Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA

500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4.7.1 Pengelolaan Benih
500.4.7.2 Kebun Benih
500.4.7.3 Tegakan Benih
500.4.7.4 Pengadaan Benih
500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.7 Pembibitan
500.4.7.8 Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9 Pengembangan Usaha Perbenihan
500.4.7.10 Pengendalian Peredaran Benih
500.4.7.11 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
500.4.7.12 Tanaman Reboisasi
500.4.7.13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
500.4.7.14 Perhutanan Sosial
500.4.7.15 Pengendalian Perladangan

500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
500.4.8.3 Diseminasi
500.4.8.4 Gelar Teknologi
500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
500.5.1 Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.5.2 Perikanan Tangkap
500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan

	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya

500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil

500.5.4.2 Pengembangan Produk

500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

500.5.4.4 Industri Pengolahan

500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil

500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi

500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias

500.5.4.8 Pengembangan Industri

500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi

500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri

500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri

500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri

500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri

500.5.4.14 Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri

500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri

500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri

500.5.4.17 Pengembangan Ekspor

500.5.4.18 Pengembangan Impor

500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri

500.5.4.20 Pelayanan Usaha

500.5.4.21 Kemitraan Usaha

500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran

500.5.4.23 Investasi dan Permodalan

500.5.4.24 Informasi dan Promosi

500.5.5 Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi

500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I

	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat

	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara

500.5.7.21 Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN

500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.6.2 Perlindungan hortikultura

500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah

500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura

500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis

500.6.3 Perbenihan Hortikultura

500.6.3.1 Penilaian Varietas

500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih

500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura

500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan

500.6.4.1 Basis Data Lahan

500.6.4.2 Pengendalian Lahan

500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan

500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan

500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi

500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air

500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air

500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup

500.6.5.4 Kelembagaan

500.6.6 Pembiayaan Pertanian

500.6.6.1 Pembiayaan Program

500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama

500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis

500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis

500.6.7 Pupuk Pestisida

500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

500.6.7.2 Pupuk Anorganik

500.6.7.3 Pestisida

500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida

500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian

500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian

500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian

500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan

500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih

500.6.9.2 Produksi Benih Serealia

500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi

500.6.9.4 Kelembagaan Benih

500.6.10 Budidaya Serealia

500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa

500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering

500.6.10.3 Jagung

500.6.10.4 Serealia Lain

500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi

500.6.11.1 Kedelai

500.6.11.2 Ubi Kayu

500.6.11.3 Aneka Kacang

500.6.11.4 Aneka Umbi

500.6.12 Tanaman Pangan

500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan

500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim

500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu

500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan

500.6.13.1 Padi

500.6.13.2 Jagung dan Serealia alin

500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang

500.6.13.4 Aneka Umbi

500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian

500.6.14.1 Tanaman Pangan

500.6.14.2 Holtikurtura

500.6.14.3 Perkebunan

500.6.14.4 Peternakan

500.6.15 Mutu dan Standariasi

500.6.15.1 Standardisasi

500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu

500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan

500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi

500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi

500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan

500.6.16.2 Investasi

500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri

500.6.16.4 Promosi Luar Negeri

500.6.17 Pemasaran Domestik

500.6.17.1 Informasi Pasar

500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga

500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar

500.6.17.4 Jaringan Pemasaran

500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, Antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat

500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan

500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi

500.6.20 Diseminasi

500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian

500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop

500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya

500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan

500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan

500.6.26 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

500.6.26.1 Hak Cipta

500.6.26.2 Hak Paten Sederhana

500.6.26.3 Hak Paten Biasa

500.6.26.4 Hak Merek

500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman

500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan

500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak

500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian

500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)

500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)

500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)

500.6.28 Pelayanan Hukum

500.6.28.1 Sertifikasi

500.6.28.2 Pertimbangan Hukum

500.6.29 Karantina Pertanian

500.6.29.1 Karantina Tumbuhan

500.6.29.2 Karantina Hewan

500.6.30 Bimbingan Teknis

500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN

500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan

500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.2.2 Pakan Ternak

500.7.2.3 Budidaya Ternak

500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan

500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.3 Bimbingn Teknis

500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim

500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim

500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.4 Tanaman Tahunan

500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan

500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan

500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan

500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan

500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan

500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan

500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha

500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan

500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan

500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama

500.9.2.1 Industri Manufaktur

500.9.2.2 Industri Agro

500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.3 Promosi Industri

500.9.3.1 Industri Manufaktur

500.9.3.2 Promosi Industri Agro

500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.4 Standarisasi dan Teknologi

500.9.4.1 Industri Manufaktur

500.9.4.2 Industri Agro

500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual

500.9.5.1 Industri Manufaktur

500.9.5.2 Industri Agro

500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.6 Industri Hijau

500.9.6.1 Industri Manufaktur

500.9.6.2 Industri Agro

500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota

500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri

500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional

500.9.12 Standarisasi

500.9.12.1 Standar

500.9.12.2 Penyiapan Penerapan

500.9.12.3 Infrastruktur Standar

500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

500.9.13.1 Kebijakan Industri

500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif

500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial

500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

500.9.14.1 Industri Hijau

500.9.14.2 Lingkungan Hidup

500.9.14.3 Energi

500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri

500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri

500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual

500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.10.2 Rekomendasi Kegeologian

500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah

500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.2.3 Pertambangan

500.10.2.4 Panas Bumi

500.10.2.5 Geosains

500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)

500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan

500.10.3 Penelitian Kegeologian

500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian

500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian

500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian

500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi

500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian

500.10.3.6 Sumber Daya Geologi

500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

500.10.3.9 Survei Geologi

500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian

500.10.4.1 Sumber Daya Geologi

500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

500.10.4.3 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.4.4 Survei Geologi

500.10.4.5 Konservasi

500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi

500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran

500.10.5.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan

500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara

500.10.5.4 Survei Geologi

500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi

500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi

500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi

500.10.6.3 Penetapan Harga Minyak Mentah

500.10.6.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi

500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

500.10.6.6 Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri

500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.7 Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)

500.10.7.2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)

500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)

500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)

500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS

500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas

500.10.7.7 Partisipasi Interest

500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan

500.10.8 Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan

500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran

500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

500.10.9 Teknik dan Lingkungan

500.10.9.1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)

	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha

500.10.14.3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

500.10.14.4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham

500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)

500.10.15 Konservasi Energi

500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi

500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi

500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE

500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast

500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi

500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca

500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi

500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi

500.10.15.9 Invesment Grade Audit (IGA)

500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE

500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE

500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga

500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE

500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja

500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik

500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik

500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu

500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistikan

500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin

500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik

500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik

500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)

500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan

500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan

	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan

	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral

	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara

500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara

500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)

500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.27.12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara

500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir

500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara

500.10.27.16 Penghargaan usaha pertambangan batubara

500.10.27.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara

500.10.28 Penerimaan Negara

500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP

500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara

500.10.29.1 Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional

500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi

500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi
500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan

	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk

500.10.34.7 Teknologi Gas

500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara

500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya

500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral

500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara

500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

500.10.36.1 Energi baru terbarukan

500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan

500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi

500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN

500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan

500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang

500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C

500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama

500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal

500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi

500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer

500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer

500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal

500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder

500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan

500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan

500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan

500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor

500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor

500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor

500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor

500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor

500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor

500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor

500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor

500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan

500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

500.11.7 Perlengkapan Jalan

500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan

500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan

500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor

500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor

500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

500.11.8 Angkutan Penumpang

500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi

500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara

500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi

500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi

500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum

500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum

500.11.8.7 Angkutan perintis

500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum

500.11.9 Angkutan Barang

500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan

500.11.9.2 Tarif angkutan barang

500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu

500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang

500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan

500.11.10 Monitoring Operasional

500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan

500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda

500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil

500.11.11.1 Pedoman Teknis

500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.11.3 Bimtek PPNS

500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan

500.11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)

500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan

500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan

500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan

500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.18.1 Manajemen lalu lintas

500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau

500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan

500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau

500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.21 Tarif dan Keperintisan

500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan

500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan

500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan

500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan

500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan

500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah

500.11.24 Angkutan Perkotaan

	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	

500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian
500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28 Pengembangan Keselamatan
500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan
500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan
500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum
500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31 Audit Keselamatan
500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32 Inspeksi Keselamatan
500.11.32.1 Pedoman keselamatan

500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.33 Parkir

500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir

500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta

500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.12.2 Telekomunikasi

500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi

500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi

500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika

500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi

500.12.3 Penyiaran

500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi

500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal

500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah

500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah

500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran

500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal

500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur

500.12.5 Pengendalian Informatika

500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi

500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi

500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran

500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban

500.12.6	e- Government	
	500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Busniness
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
	500.12.12.2	Informasi Perekonomian

500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat

500.12.13 Pengelolaan Media Publik

500.12.13.1 Media Cetak

500.12.13.2 Media Online

500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual

500.12.14 Kemitraan Komunikasi

500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara

500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha

500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi

500.12.15 Infrastruktur Informatika

500.12.15.1 Jaringan

500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika

500.12.15.3 Keamanan Informatika

500.12.16 Sistem dan Data

500.12.16.1 Portal dan Konten

500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi

500.12.17 Pusat Kerjasama

500.12.17.1 Kerja Sama daerah

500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral

500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

500.12.18.1 Pelayanan Informasi

500.12.18.2 Hubungan Masyarakat

500.12.18.3 Bimbingan Teknis

500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata

500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata

500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata

500.13.2.3 Industri Pariwisata

500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event

500.13.3 Pemasaran Pariwisata

500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata

500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri

500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri

500.13.3.4 Pencitraan Indonesia

500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya

500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman

500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik

500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa

500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK

500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media

500.13.5.2 Desain dan Arsitektur

500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi

500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif

500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK

500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi

500.14.2.1 Perencanaan

	500.14.2.2	Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan

500.14.3.3 Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas

500.14.3.4 Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi

500.14.3.5 Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan

500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei

500.14.4 KonsolidasiI Data Statistik

500.14.4.1 Kompilasi Data

500.14.4.2 Analisis data

500.14.4.3 Penyusunan Publikasi

500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja

500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah

500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta

500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi

500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi

500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi

500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan

500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan

500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian

500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
- 500.15.4.1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
- 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
- 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
- 500.15.4.4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga

500.15.5 Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
- 500.15.5.1 Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
- 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
- 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan
- 500.15.5.4 Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan

500.15.6 Bina Pemagangan
- 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri
- 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri
- 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan
- 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan

500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
- 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
- 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
- 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
- 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan

500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
- 500.15.8.1 Informasi Pasar Kerja
- 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja
- 500.15.8.3 Bursa Kerja
- 500.15.8.4 Analisis Jabatan

500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
- 500.15.9.1 Antar Kerja
- 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus
- 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
- 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja

500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
- 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
- 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
- 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
- 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga

500.15.11 Standardisasi Profesi
- 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
- 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi

500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
- 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
- 500.15.12.2 Perjanjian Kerja
- 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
- 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja

500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
- 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
- 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
- 500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial

500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.14.1 Pengupahan
- 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
- 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja

500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan
500.15.20 Bina Penegakan Hukum
500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL

500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4 Promosi Penanaman Modal
500.16.4.1 Pengembangan Promosi
500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
500.16.4.4 Promosi Sektoral
500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi

500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal

500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral

500.16.5.2 Kerja Sama Regional

500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional

500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal

500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal

500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal

500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah

500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal

500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal

500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi

500.16.7.2 Pelayanan Perijinan

500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan

500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan

500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan

500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah

500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan

500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian

500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah

500.17.3.1 Penatagunaan Tanah

500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik

500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah

500.17.4 Sengketa Tanah

500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa

500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi

- 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
- 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
- 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
- 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan

500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

- 500.18.3.1 Penyiapan Lahan
- 500.18.3.2 Penyiapan Sarana
- 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
- 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman

500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

- 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
- 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
- 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
- 500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi

500.18.5 Partisipasi Masyarakat

- 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
- 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
- 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
- 500.18.5.4 Pelayanan Investasi

500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

- 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
- 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
- 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
- 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
- 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan

500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat

- 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
- 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
- 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
- 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi

500.18.8 Pengembangan Usaha

500.18.8.1 Kewirausahaan
500.18.8.2 Produksi
500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
500.18.9.2 Pengembangan Sarana
500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10 Penyerasian Lingkungan
500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
600.1 PEKERJAAN UMUM
600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
600.1.2.2 Kelembagaan
600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3 *Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air*
600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.3.2 Manajemen Mutu
600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai

600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6 Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)

600.1.6.1 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.3 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo

600.1.6.4 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo

600.1.6.5 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan

600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan

600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan

600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan

600.1.8 Pembangunan Jalan

600.1.8.1 Standar dan Pedoman

600.1.8.2 Manajemen Konstruksi

600.1.8.3 Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage

600.1.8.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng

600.1.9 Preservasi Jalan

600.1.9.1 Standar dan Pedoman

600.1.9.2 Perencanaan Teknis

600.1.9.3 Teknik Rekonstruksi

600.1.9.4 Teknik Pemeliharaan Jalan

600.1.10 Pengelolaan Jembatan

600.1.10.1 Standar dan Pedoman

600.1.10.2 Perencanaan Teknis

600.1.10.3 Teknik Jembatan

600.1.10.4 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus

600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah

600.1.11.1 Bimbingan Teknik Jalan Daerah

600.1.11.2 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar

600.1.11.3 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan

600.1.12 Pengaturan Jalan Tol

600.1.12.1 Persiapan pengusahaan jalan tol

600.1.12.2 Pengadaan Investasi Jalan Tol

600.1.12.3 Teknik Pengaturan Jalan Tol

600.1.12.4 Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol

600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

600.1.13.1 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan

600.1.13.2 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan

600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman

600.1.14.1 Perencanaan Teknis

600.1.14.2 Kawasan Permukiman Perkotaan

600.1.14.3 Kawasan Permukiman Pedesaan

600.1.14.4 Kawasan Permukiman Khusus

600.1.14.5 Kelembagaan

600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan

600.1.15.1 Perencanaan Teknis

600.1.15.2 Penataan Bangunan Gedung

600.1.15.3 Pengelolaan Rumah Negara

600.1.15.4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus

600.1.15.5 Kelembagaan

600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

600.1.16.1 Perencanaan Teknis

600.1.16.2 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan

600.1.16.3 Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan

600.1.16.4 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
600.1.16.5 Kelembagaan
600.1.16.6 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600.1.17.1 Perencanaan Teknis
600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
600.1.17.5 Kelembagaan
600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan

600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan

600.2.5.2 Analisa Teknik

600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian

600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan

600.2.6 Penyediaan Rumah Susun

600.2.6.1 Perencanaan Teknik

600.2.6.2 Penyediaan

600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan

600.2.6.4 Pengelolaan

600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus

600.2.7.1 Perencanaan Teknik

600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus

600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi

600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya

600.2.7.5 Perencanaan Teknik

600.2.7.6 Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni

600.2.7.7 Pelaksanaan Bantuan Simultan

600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial

600.2.8.1 Perencanaan Teknik

600.2.8.2 Pemberian Bantuan Rumah Umum

600.2.8.3 Fasilitasi Hunian Berimbang

600.2.8.4 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan

600.2.9 Investasi Infrastruktur

600.2.9.1 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur

600.2.9.2 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur

600.2.9.3 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur

600.2.9.4 Pasar Infrastruktur

600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

600.2.10.1 Sistem Penyelenggaraan

600.2.10.2 Kontrak Konstruksi

600.2.10.3 Konstruksi Berkelanjutan

600.2.10.4 Manajemen Mutu

600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

600.2.11.1 Kelembagaan

600.2.11.2 Material dan Peralatan Konstruksi

600.2.11.3 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri

600.2.11.4 Usaha Jasa Konstruksi

600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi

600.2.12.2 Penerapan Kompetensi

600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi

600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas

600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama

600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi

600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi

600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja

600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu

600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi

600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi

600.2.15.2 Pengembangan Materi

600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi

600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)

600.2.16.1 Antar Sektor

600.2.16.2 Antar Wilayah

600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis

600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis

600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis

600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan

600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan

600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru

600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan

600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan

600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)

600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)

600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah

600.3.2 Perencanaan

600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)

600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten

600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)

600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten

600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota

600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota

600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian

600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang

600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.4 Pemetaan

600.3.4.1 Peta Dasar

600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat

600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air

600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan

600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor

600.4.3.1 Evaluasi Penerapan

600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup

600.4.4 Ekonomi Lingkungan

600.4.5 Dampak Lingkungan

600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan

600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan

600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut

600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan

600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa

600.4.6.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas

600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil

600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak

600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan

600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa

600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas

600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil

600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak

600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan

600.4.8.1 Pengembangan

600.4.8.2 Pemanfaatan

600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik

600.4.8.4 Keamanan Hayati

600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan

600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat

600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem

600.4.9.2 Rawa

600.4.10 Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer

600.4.10.1 Perangkat mitigasi

600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon

600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan

600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim

600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain : Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim

600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim

600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi

600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun

600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut

600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun

600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan

600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan

600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping

600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas

600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3

600.4.14.1 Pemantauan

600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi

600.4.15 Pengelolaan Sampah

600.4.15.1 Pembatasan sampah

600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah

600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura

600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura

600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan

600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan

600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan

600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan

600.4.17.1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan

600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan

600.4.18 Penegakan hukum pidana lingkungan

600.4.18.1 Penyidikan

600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut

600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS

600.4.19 Komunikasi Lingkungan

600.4.19.1 Pengembangan Komunikasi

600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye

600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat

600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan

600.4.20.2 Kearifan Lingkungan

600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat

600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan

600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan

600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan

600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat

600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha

600.4.23 Data dan Informasi Lingkungan

600.4.23.1 Pengelolaan Data

600.4.23.2 Pengelolaan Informasi

600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak

600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan

600.4.24 Kelembagaan Lingkungan

600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana

600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal

600.4.25 Standarisasi dan teknologi

600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan

600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan

600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan

600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan

600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1 Rencana Pengawasan

700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan

700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan

700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan

700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan

700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah

700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan

700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)

700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut

700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat

700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan

700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review

700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain : Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan

	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain : Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain : Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain : Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain : Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai

800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja

800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)

800.1.4 Pengembangan Karir

800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta

800.1.4.2 Penyesuaian ijazah

800.1.4.3 Penyusunan Sistem Karier

800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja

800.1.4.5 Angka Kredit Antara lain : Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit

800.1.5 Kinerja Aparatur Sipil Negara

800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja

800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja

800.1.5.3 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja

800.1.6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

800.1.6.1 Kode Etik Pegawai

800.1.6.2 Disiplin

800.1.6.3 Pemberhentian Dengan Hormat

800.1.6.4 Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

800.1.6.5 Pemberhentian Sementara

800.1.6.6 Pensiun ASN Antara lain : Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya

800.1.7 Bantuan Hukum

800.1.8 Status dan Kedudukan Pegawai

800.1.8.1 Status Kepegawaian

800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian

800.1.8.3 Keberatan Pegawai

	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	

800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS
800.1.12.3 Tabungan Perumahan
800.1.12.4 Bantuan Sosial
800.1.12.5 Pakaian Dinas
800.1.12.6 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih
800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
800.1.12.9 Olahraga dan Rekreasi
800.1.12.10 Rekam Medis

800.1.13 Administrasi Perseorangan
800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
800.1.13.2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
800.1.13.4 Sekretaris Daerah
800.1.13.5 ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional

800.1.14 Penilaian Kompetensi
800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
800.1.14.2 Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
800.2.2.1 Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
800.2.2.4 Modul-modul diklat
800.2.2.5 Panduan fasilitator
800.2.2.6 Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
800.2.2.7 Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat

800.2.3 Widyaiswara

800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
800.2.3.2 Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
800.2.3.4 Penilaian Widyaiswara
800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
800.2.3.6 Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara

800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
800.2.4.5 Sistem informasi diklat
800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat
800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat

800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)
900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

900.1.2 Penyusunan Anggaran
900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan

	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)

900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.

900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),

900.1.4.10 Staff Appraisal Report

900.1.4.11 Report /Laporan

900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah

900.1.4.13 *Completion Report/Annual Report*

900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi

900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran

900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan

	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu

900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan

	900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
	900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
	900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah	
	900.1.12.1	Anggaran Daerah
	900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain : fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain : analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain : fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain : Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.2 Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah

900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah

900.1.15.4 Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain : Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO